

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan dalam sistem keuangan memegang peran penting pada stabilisasi perekonomian suatu negara. Industri perbankan mempunyai tujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan. Perbankan menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan lembaga tersebut telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kebutuhan akan pengetahuan dan informasi mengenai perbankan harus dapat terpenuhi dengan baik, dan tepat. Penilaian kesehatan bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 13/1/PBI/2011 tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor *Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan (RGEC)*.² Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari berbagai indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang

² Ika Wulandari, "Perbandingan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Lima Bank yang Masuk Kategori BUKU 4 di Indonesia Periode 2016", *Jurnal JRAMB*, Volume. 4 No. 1., 2018. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020

bersangkutan. Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan.³

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian kesehatan bank dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Hasil penilaian kesehatan bank tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang diperoleh Bank Indonesia. Dengan keadaan bank yang tidak sehat itupun juga dapat berakibat buruk bagi kinerja keuangan, bukan hanya membahayakan diri sendiri akan tetapi pihak lain juga.⁴ Maka dari itu Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga keuangan, dan ketentuan itu mengalami beberapa kali perubahan atau penyempurnaan metode.

Penilaian tingkat kesehatan bank mengalami beberapa kali perubahan yang sebelumnya CAMEL, CAMELS, dan kemudian diperbarui menggunakan metode RGEC. Metode RGEC mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dan juga mengacu pada Surat Edaran (SE) BI No. 13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank. Penilaian RGEC ditentukan dengan menilai empat faktor yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu faktor *risk profil*, faktor *governance*, faktor *earnings* dan faktor *capital*. Faktor pertama yang digunakan dalam

³ Arief Sugiono, dkk., *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 5

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 22

penelitian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan RGEC ialah *risk profile*, sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011, terdapat sepuluh faktor *risk profile* atau profil risiko.⁵

Penelitian ini dilakukan pada Bank Berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa yaitu Lima Bank Pembangunan Daerah yang menjalankan operasionalnya secara konvensional dan syariah yaitu Bank Jawa Timur, Bank Jawa Tengah, Bank BJB Syariah, Bank DIY, Bank DKI. Ke lima BPD tersebut juga merupakan jenis bank yang turut berperan dalam menggerakkan pembangunan ekonomi dan telah beroperasi secara konvensional dan syariah. Beroperasi secara syariah dengan cara membuka Unit usaha syariah. Unit usaha syariah terbentuk karena Bank konvensional yang ingin melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pengertian unit usaha syariah sendiri yaitu unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatannya perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.⁶

Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan bank-bank milik pemerintah daerah yang didirikan menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Asas-asas Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Tujuan didirikannya untuk membantu melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan

⁵ Peraturan Bank Indonesia PBI NO. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Pasal 7

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada media Group, Cetakan Pertama 2011), hal. 41

perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang/ penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan.⁷

Bank Pembangunan Daerah bukanlah satu kategori atau jenis bank tersendiri, tetapi masuk dalam kategori Bank Umum. Disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah karena memang Bank Pembangunan Daerah ditunjuk sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi untuk turut mendukung program kerja Pemerintah Provinsi yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan. Sekarang ini secara umum pandangan masyarakat terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah semakin positif. Dengan semakin positif diharapkan peran dan kontribusinya tentu saja semakin dinantikan tidak hanya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah masing-masing tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia secara makro.⁸

Sebagai sistem hidup yang sempurna Islam menginginkan pada umatnya agar dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berpedoman dengan Al-quran.⁹ Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga

⁷ Dessy Oetari Ma'ruf, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning And Capital (RGEC) pada BPD se-Indonesia Periode Tahun 2015 – 2017", *Jurnal EMBA* Vol. 7 No.2, 2019. Diakses 10 Mei 2020 pukul 18.00

⁸Fakhrurrojihan, *Mengenal Bank Pembangunan Daerah*, <https://fakhrurrojihan.wordpress.com/2015/03/30/mengenal-bank-pembangunan-daerah/> Diakses 11 Mei 2020 Pukul 04.00

⁹ Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, Cetakan 1 2011), hal. 4

mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).¹⁰ Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut dijelaskan bahwa Perbankan Syariah yaitu mencakup Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹¹

Bank Pembangunan Daerah berupaya untuk memenuhi keinginan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan cara membuka unit usaha syariah, selain juga beroperasi secara konvensional. Dengan BPD yang beroperasi dengan dua sistem terbukti dengan perkembangan aset Bank Pembangunan Daerah pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Aset Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Pulau Jawa
Tahun 2014 – 2018

Nama Bank	Total Aset (dalam jutaan rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
PT BPD Jawa Timur	37.998.046	42.803.631	43.032.950	51.518.681	62.689.118
PT BPD Jawa Tengah	35.560.882	40.923.960	51.245.700	61.466.427	66.844.677
Bank BJB Syariah	6.093.488	6.439.966	7.441.653	7.713.558	6.741.449
PT Bank BPD DIY	7.821.592	8.869.887	9.739.526	10.695.372	11.993.576
Bank DKI	36.441.000	38.638.000	40.567.000	51.417.000	53.028.000

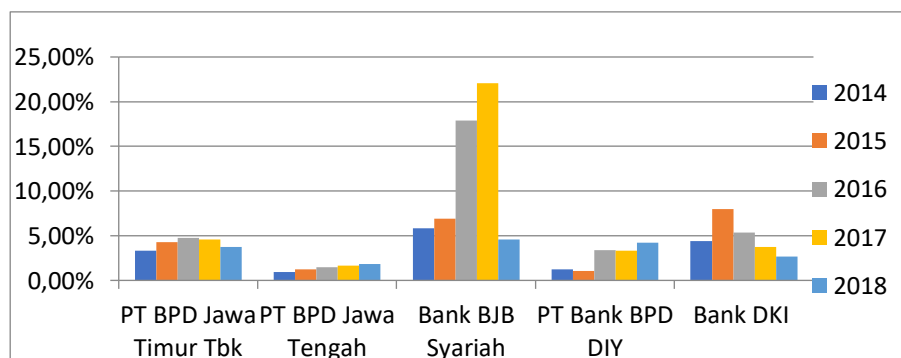
¹⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. (Qiara Partner: Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 24

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan Pertama 2011), hal. 41

Sumber: Laporan keuangan Tahunan BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, BPD BJB Syariah, BPD DIY, BPD DKI, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Bank Pembangunan Daerah mempunyai jumlah aset yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada BPD Bank Jawa Tengah dengan aset terbesar dibandingkan Bank Pembangunan Daerah lain pada tahun 2018 dengan jumlah asetnya Rp. 66.844.677.000.000,00. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah lainnya merupakan bank yang mempunyai aset yang besar. Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat dipahami bahwa dengan adanya aset Bank Pembangunan Daerah yang besar akan dapat menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap bank pembangunan daerah semakin tinggi. Akan tetapi, besarnya aset bank pembangunan daerah belum bisa tentu menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Ada beberapa komponen selain aset yang menjadikan dijadikan acuan untuk mentukan kesehatan suatu bank yang dijelaskan pada tabel-tabel berikut.

Grafik 1.1
Perkembangan Non-Performing Loan (NPL) atau Non-Performing Finance (NPF) Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Pulau Jawa Tahun 2014 – 2018



Sumber: Laporan keuangan Tahunan BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, BPD BJB Syariah, BPD DIY, BPD DKI (data diolah), 2020

Berdasarkan grafik 1.1 terlihat bahwa Bank Pembangunan Daerah mempunyai jumlah NPL/NPF Gross yang cukup besar yang dapat dilihat pada Bank BJB Syariah dengan NPF sebesar 22,04 % pada tahun 2017. Non-Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan oleh debitur. Menurut Darmawi, NPL meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah disetujui, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga kemungkinan risiko kredit dapat bertambah tinggi. Meningkatnya NPL jika dibiarkan secara terus menerus akan dapat memberikan dampak negatif bagi bank. Dampak negatifnya yaitu memperbesar biaya pencadangan aktiva produktif yang dapat berimbas terhadap tingkat kesehatan bank.¹²

Tabel 1.2
Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2018 –Triwulan III-2019 dan
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV-2019 Tingkat
Nasional dan Provinsi

Provinsi	Triwulan					
	III-2018	IV-2018	I-2019	II-2019	III-2019	IV-2019*)
Jawa Timur	97,93	113,83	105,44	127	99,44	103,14
Jawa Tengah	99,51	110,17	104,59	125,73	99,48	101,47
Jawa Barat	100,51	108,24	104,01	124,97	99,53	105,34
DI Yogyakarta	99,89	114,28	115,55	127,3	103,47	108,03
DKI Jakarta	101,27	116,11	103,94	129,82	101,67	107,26

¹² Rahmad Dwi Alfian, “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEK (Studi pada Bank Jatim dan Bank Jateng Tahun 2011-2015)” (Surabaya: Skripsi Dipublikasikan STIE Perbanas Surabaya, 2016)

Sumber: BPS, Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen 2019 (diolah), 2020

Catatan: *) Angka Perkiraan ITK triwulan IV-2019

Berdasarkan tabel 1.2, Indeks Tendensi Konsumen mengalami naik turun disetiap triwulannya yang fluktuatif di setiap provinsi. Indeks Tendensi Konsumen antara triwulan III-2018 sampai perkiraan triwulan IV-2019 tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta triwulan II-2019 sebesar 129,82 dan terendah pada perkiraan triwulan III-2018 sebesar 97,93 di Provinsi Jawa Timur. Indeks Tendensi Konsumen merupakan indeks komposit untuk mengukur kondisi ekonomi berdasarkan persepsi rumah tangga (konsumen). Dimana Indeks Tendensi Konsumen (ITK) terdiri dari dua jenis indeks yaitu Indeks Indikator Kini (ITK Kini) dan Indeks Indikator Mendatang (ITK Mendatang).

ITK Kini digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi triwulan berjalan (saat survei) dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. ITK Mendatang digunakan untuk memperkirakan kondisi ekonomi rumah tangga (konsumen) pada periode tiga bulan mendatang. ITK Kini dibangun dari tiga indikator. Sementara itu, ITK Mendatang dibangun dari dua indikator. Indeks tendensi konsumen terbentuk dari hasil pengolahan Survei Tendensi Konsumen (STK).¹³ Dengan adanya indeks tendensi konsumsi yang berbeda-beda disetiap daerah tersebut akan mempengaruhi terhadap tingkat konsumen

¹³ BPS, *Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen 2019* <https://bulelengkab.go.id/assets/instansikab/126/bankdata/statistik-indeks-tendensi-bisnis-dan-indeks-tendensi-konsumen-2017-37.pdf>

atas pemenuhan kebutuhannya. Dengan adanya tingkat konsumen yang tinggi tersebut juga berakibat pada tingkat minat masyarakat terhadap produk bank

Tabel 1.3
ROA Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Pulau Jawa
Tahun 2014–2018

Nama Bank	ROA (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
PT BPD Jawa Timur Tbk	3,52	2,67	2,98	3,12	2,96
PT BPD Jawa Tengah	2,84	2,60	2,60	2,69	2,66
Bank BJB Syariah	0,72	0,25	-8,09	-5,69	0,54
PT Bank BPD DIY	2,88	2,94	3,05	2,88	2,84
Bank DKI	2,1	0,89	2,19	2,04	2,24

Sumber: Laporan keuangan Tahunan BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, BPD BJB Syariah, BPD DIY, BPD DKI, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 dapat terlihat bahwa rasio ROA pada tahun 2014-2018 terendah berada pada $-8,09\%$ pada tahun 2016 yang dimiliki oleh bank BJB Syariah. Untuk rasio ROA tertinggi pada bank Jawa Timur sebesar $3,52\%$. Rasio ROA merupakan rasio profitabilitas yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari total aktivasnya. Untuk perhitungan rasio ROA dengan laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. Dimana semakin tinggi rasio ROA maka laba yang bisa dihasilkan juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil rasio ROA berarti bank kurang mampu dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan pembiayaannya.

Tabel 1.4
CAR Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Pulau Jawa
Tahun 2014 – 2018

No	Nama Bank	CAR (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	PT BPD Jawa Timur Tbk	22,17	21,22	23,88	24,65	24,21
2.	PT BPD Jawa Tengah	14,34	14,87	20,25	20,07	18,31
3.	Bank BJB Syariah	15,78	22,53	18,25	16,25	16,43
4.	PT Bank BPD DIY	16,61	20,22	21,61	19,97	19,41
5.	Bank DKI	17,96	24,53	29,79	29,88	24,23

Sumber: Laporan keuangan Tahunan BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, BPD BJB Syariah, BPD DIY, BPD DKI, 2020

Berdasarkan tabel 1.4 dapat terlihat bahwa rasio CAR mengalami kenaikan dan penurunan presentase yang fluktuatif setiap tahunnya. CAR pada tahun 2014-2018 terendah tahun 2014 sebesar 14,34% yang dimiliki oleh PT BPD Jawa Tengah. Untuk rasio CAR tertinggi tahun 2014-2018 dimiliki oleh bank DKI sebesar 29,88% tahun 2017 tertinggi diantara beberapa Bank Pembangunan Daerah lainnya. Dimana CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, seperti resiko pembiayaan, resiko operasional dan resiko pasar.

Permasalahan yang ada di Bank Pembanguna Daerah yang telah

dipaparkan, maka masih perlu dilakukan penelitian kembali. Bank Pembangunan Daerah yang asetnya besar tetapi tingkat NPL masih tinggi bagaimana dengan keadaan atau kesehatan bank tersebut, dengan Indeks Tendensi Konsumen tiap provinsi yang saling mempengaruhi, rasio CAR, dan rasio ROA. Maka perlu dilakukannya penilaian kesehatan Bank Pembangunan Daerah tersebut. Penilaian tingkat kesehatan bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat yang hasilnya tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang diperoleh Bank Indonesia. Dengan keadaan bank yang tidak sehat itupun juga dapat berakibat buruk bagi kinerja keuangan, membahayakan diri sendiri dan pihak lain.

Melakukan penilaian tingkat kesehatan bank diperlukan oleh semua pihak yang terkait, Maka penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Penilaian kesehatan Bank Berstatus Badan Usaha Milik Daerah Terbesar di Pulau Jawa dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) Tahun 2012 – 2019**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang peneliti menemukan masalah-masalah yang perlu diidentifikasi yaitu tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah. Tingkat kesehatan bank diperlukan oleh semua pihak yang terkait, berguna dalam upaya mempertahankan loyalitas para

nasabah, untuk menjaga kelangsungan usaha, untuk memprediksi kondisi kesehatan perbankan dimasa sekarang dan yang akan datang.

1. Bank Berstatus Badan Usaha Milik Daerah ditinjau dari *Risk Profile*, selama periode penelitian memiliki risiko kredit atau resiko pembiayaan (NPL/NPF) yang masih tinggi jika dibiarkan akan memberikan dampak negatif bagi bank tersebut.
2. Bank Berstatus Badan Usaha Milik Daerah ditinjau dari *Good Corporate Governance* selama periode penelitian bank berusaha mempertahankan keadaan atau menjadi lebih baik. GCG merupakan penilaian secara kualitatif yang dilakukan oleh setiap bank.
3. Bank Berstatus Badan Usaha Milik Daerah ditinjau dari *Earnings* yang ditinjau menggunakan perhitungan ROA ada yang dalam keadaan setiap tahun meningkat menjadi lebih baik, dan tetapi ada bank yang mengalami penurunan hingga dalam keadaan tidak sehat. Dengan keadaan bank ada yang dalam keadaan tidak sehat tersebut berarti bahwa bank kurang mampu dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan pembiayaan.
4. Bank Berstatus Badan Usaha Milik Daerah ditinjau dari modal atau *Capital* nilainya sudah diatas ketentuan minimal Bank Indonesia yaitu 8%, tetapi hal tersebut belum bisa menentukan bahwa keadaan bank dalam keadaan sehat karena kadaaan bank juga dipengaruhi oleh beberapa rasio keuangan lainnya.

5. Dengan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai aset besar, dan NPL/NPF juga besar belum tentu menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat, dan pengaruhnya pada minat masyarakat atau investor yang beralih kepada bank yang mempunyai tingkat kesehatan lebih baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari *Risk Profile* selama Periode 2012 – 2019?
2. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari *Good Corporate Governance* selama Periode 2012 – 2019?
3. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari *Earning* selama Periode 2012 – 2019?
4. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari *Capital* selama Periode 2012 – 2019?
5. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari metode RGEC (*Risk*

Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital) selama Periode 2012 – 2019?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari *Risk Profile* selama Periode 2012 – 2019.
2. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari *Good Corporate Governance* selama Periode 2012 – 2019.
3. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari *Earnings* selama Periode 2012 – 2019.
4. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari *Capital* selama Periode 2012 – 2019.
5. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan bank berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa ditinjau dari metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) selama Periode 2012 – 2019.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau teori, memperkaya wawasan pengetahuan khususnya tentang penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*).

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan (Bank Pembangunan Daerah)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau memberikan tambahan informasi kedepannya bagi Bank Pembangunan Daerah di Pulau Jawa pada Bank Jawa Timur, Bank Jawa Tengah, Bank BJB Syariah, Bank DIY, dan Bank DKI terkait.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam karya ilmiah, sarana informasi, dan menambah perbendaharaan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penelitian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada lima Bank Pembangunan Daerah di pulau Jawa yaitu Bank Jatim, Bank BJB Syariah, Bank DIY, dan Bank DKI. Untuk periodenya selama triwulan II (Juni) 2012 sampai triwulan III (September) 2019 diperoleh dari laporan keuangan triwulanan dan laporan GCG dari *website* bank-bank yang termasuk dalam sampel maupun dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id. Dengan menggunakan rasio *risk profile* dengan menggunakan risiko kredit (NPL/NPF) (X1), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rasio (LDR/LDR) (X2), *Good Corporate Governance* (X3), *Earnings* (ROA) (X4), dan *Capital* (CAR) (X5).

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya terbatas pada periode waktu dan ketersediaan data tingkat kesehatan bank atau rasio keuangan, yaitu pada laporan keuangan triwulan dan laporan GCG lima Bank Pembangunan Daerah terbesar di pulau Jawa.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Penilaian

Penilaian adalah seseorang atau komite yang mempunyai wewenang secara formal untuk menilai bawahannya di dalam ataupun di luar

pekerjaan dan berhak menerapkan kebijakan selanjutnya terhadap karyawan itu kedepannya.¹⁴

b. Kesehatan Bank

Kesehatan Bank menurut Ikatan Bankir Indonesia

“Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank.”¹⁵

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan berbagai macam fungsinya dengan baik. Menurut Sholihin, bank dapat dikatakan bank yang sehat adalah keadaan suatu bank yang dapat menjaga, memelihara kepercayaan masyarakat, dan dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.¹⁶

c. Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*).

1) *Risk Profile* (Profil Risiko)

Profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Dalam penelitian ini menggunakan penilaian risiko pembiayaan atau risiko kredit dan faktor risiko likuiditas.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/penilaian>, Diakses Pada 12 Desember 2020

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Berbasis Risiko Edisi Pertama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Pusat, 2016), hal. 10

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 264.

- a) Risiko pembiayaan, diukur dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) yang disebut juga NPL (*Non Performing Financing*) dalam bank konvensional merupakan pembiayaan bermasalah sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.¹⁷
- b) Risiko likuiditas, diukur dengan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) atau disebut juga LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dalam bank konvensional, merupakan risiko yang terjadi karena ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas yang dapat digunakan.¹⁸

2) *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* yang berarti perusahaan, dan *governance* yang berarti peraturan.¹⁹ *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai

¹⁷ Y. Sri Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.94.

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.73.

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 39

Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.²⁰

3) *Earning* (Rentabilitas)

Earning (Rentabilitas) merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisien usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.²¹ Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan melalui penilaian terhadap beberapa komponen.²²

4) *Capital* (Permodalan)

Capital (Permodalan) merupakan evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan pemodal, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum, dan dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank.²³

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini bermaksud untuk menguji analisis penilaian Bank Berstatus Badan Usaha Milik Daerah terbesar di Pulau Jawa dengan menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile*,

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.73

²¹ Suad Husnan, *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1998), hal.67.

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hal. 57

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 54-55

Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital) Tahun 2012 – 2019”.

H. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal

Terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Utama

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas (a) latar belakang masalah, (b) indentifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Terdiri atas (a) teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, (c) dan seterusnya [jika ada], (d) kajian penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual, dan (f) hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri atas (a) berisi pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri atas (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data pengujian hipotesis), serta (b) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban masalah dalam penelitian dan menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada.

BAB VI PENUTUP

Terdiri atas (a) kesimpulan, dan (b) saran.

3. Bagian akhir, terdiri atas (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.